

**HUBUNGAN EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF  
DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG No 22 /1999**

**(Studi diskriptif atas Peranan Eksekutif dan Legislatif dalam  
Proses Formulasi Kebijakan di Provinsi Jawa Timur)**

**SKRIPSI**

FK  
Fis P 02 /03  
Mei  
h



Oleh :  
**Dian Orvi Meirlina**  
**NPM. 079815635**

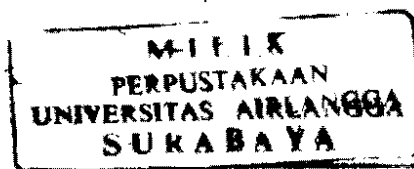
**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2002**

**HUBUNGAN EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF  
DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG No 22 /1999**

**(Studi diskriptif atas Peranan Eksekutif dan Legislatif dalam  
Proses Formulasi Kebijakan di Provinsi Jawa Timur)**

**S K R I P S I**

**Diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk  
memperoleh gelar S1**



**Oleh :**

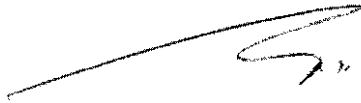
**Dian Orvi Meirlina**

**NPM. 079815635**

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2002**

## **Lembar Persetujuan**

**Pembimbing Skripsi,**

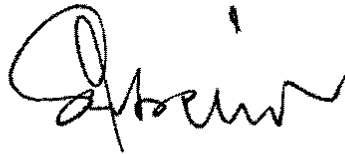


**Dra Siti Aminah, MA**  
**NIP. 131836624**

## Lembar Pengesahan

Telah diujikan pada tanggal 18 Oktober 2002  
Oleh Tim Penguji

Ketua



Drs Sutrisno, MS  
NIP. 130937951

Anggota



Dra Siti Aminah, MA  
NIP. 131836624



Drs Kris Nugroho, MA  
NIP. 131801408

Universitas Airlangga  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Program Studi Ilmu Politik  
Surabaya, 2002

### ABSTRAK

Nama : Dian Orvi Meirlina  
NPM : 079815635  
Judul : Dinamika Hubungan Eksekutif dan Legislatif dalam Perspektif Undang-undang No 22 Tahun 1999  
Kepustakaan : Literatur (1993-2002), textbook 14 eksemplar, jurnal 3 eksemplar, surat kabar 13 eksemplar dan produk hukum 13 buah.  
Jumlah Halaman : 200 halaman (lembar persetujuan, pengesahan dan persembahan 3 halaman, abstrak 2 halaman, daftar isi, tabel dan bagan 6 halaman, isi 185 halaman, lampiran 7 halaman)

Dinamika hubungan eksekutif dan legislatif dalam perspektif Undang-undang No 22 Tahun 1999 diangkat sebagai judul karena penulis yakin bahwa penerapan Undang-undang No 22 Tahun 1999 telah membawa perubahan pada hubungan eksekutif dan legislatif di daerah khususnya dalam proses formulasi kebijakan. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana dinamika hubungan eksekutif dan legislatif di daerah dalam penerapan Undang-undang No 22 Tahun 1999 dan bagaimana peranan eksekutif dan legislatif dalam proses formulasi kebijakan Pemerintah Daerah. Penulis menjawab kedua permasalahan diatas dengan cara mengikuti proses formulasi kebijakan daerah baik kebijakan APBD maupun non anggaran, dan mengamati dinamika hubungan serta peranan eksekutif dan legislatif dalam proses tersebut. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan pengumpulan data dokumen. Penentuan informan ditentukan atas pertimbangan keterlibatannya dalam formulasi kebijakan yang diamati sebagai sample. Kerangka pemikiran yang digunakan dalam menganalisa masalah adalah konsep kebijakan publik dan transisi demokrasi. Pada prakteknya penulis meneliti penolakan Raperda yang diajukan eksekutif dan konflik yang terjadi pada pengajuan tambahan anggaran

kerja oleh instansi Pemerintah Provinsi. Pada dasarnya wewenang DPRD yang besar seperti yang tercantum dalam Undang-undang No 22 Tahun 1999 telah membuat DPRD meninggalkan fungsi utamanya sebagai wakil rakyat yang harus mendengar suara rakyat dan menuangkannya dalam Peraturan Daerah. Formulasi kebijakan di Provinsi Jawa Timur merupakan proses elitis dimana Peraturan Daerah dibuat dalam gedung Pemerintah Daerah dan DPRD yang steril dari pengaruh rakyat. Proses formulasi kebijakan lebih merupakan proses tawar-menawar antara eksekutif dan legislatif daripada sebuah proses yang mengutamakan kepentingan rakyat sebagai subjek dan penerapan peraturan daerah. Kebijakan inkremental yang cenderung untuk memperbaiki keadaan daripada menyelesaikan masalah tetap dianut oleh Pemerintah Daerah maupun DPRD sendiri. Transisi demokrasi yang terjadi di Indonesia telah melembagakan konflik kepentingan antara eksekutif dan legislatif. Penataan kelembagaan di Provinsi Jawa Timur telah membantu mewujudkan kepentingan legislatif maupun eksekutif, tetapi konflik antara keduanya tetaplah belum berakhir karena hasil konflik berujung pada ketidakpastian tidak dapat ditentukan oleh penataan kelembagaan yang dilakukan. Jadi dapat disimpulkan bahwa dinamika hubungan eksekutif dan legislatif di daerah penuh dengan konflik kepentingan, lembaga legislatif Provinsi Jawa Timur tidak menjalankan fungsinya secara maksimal seperti yang dituangkan dalam Undang-undang No 22 Tahun 1999.